

REKAPITULASI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS PROLEGNAS TAHUN 2007
(SESUAI DENGAN KEPUTUSAN DPR NOMOR : 07A/DPR RI-RI/I/2006-2007)
(SEBANYAK 30 RUU)

NO.	JUDUL RUU	PERKEMBANGAN	KET
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional	Sesuai dengan urgensi dan judul	-
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (16 RUU)	Sesuai dengan urgensi dan judul	
	1) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara.	Surat Presiden RI Nomor R.01/Pres/01/2007 tanggal 2 Januari 2007, menugaskan Mendagri mewakili Pemerintah dalam pembahasan di DPR-RI.	
	2) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Angkola Sipirok di Provinsi Sumatera Utara.	-sda-	
	3) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.	-sda-	
	4) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mandau di Provinsi Riau.	-sda-	
	5) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	-sda-	
	6) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten kota Tual di Provinsi Maluku.	-sda-	
	7) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua.	-sda-	
	8) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua.	-sda-	
	9) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua.	-sda-	
	10) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Memberamo Tengah di Provinsi Papua.	-sda-	
	11) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua.	-sda-	
	12) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di	-sda-	

NO.	JUDUL RUU	PERKEMBANGAN	KET
	Provinsi Papua.		
	13) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.	-sda-	
	14) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur.	-sda-	
	15) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.	-sda-	
	16) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.	-sda-	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah, Koordinasi dengan Badan Legislasi/DPR RI	Inisiatif Pemerintah
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik	Prioritas Utama, Dipersiapkan Pemerintah, Koordinasi dengan Badan Legislasi/DPR RI	Inisiatif Pemerintah
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum	Prioritas Utama, Dipersiapkan Pemerintah, Konsultasi denganh Badan Legislasi/DPR RI	Inisiatif Pemerintah
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kadudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Prioritas Utama, Dipersiapkan Pemerintah, Konsultasi dengan Badan Legislasi/DPR RI	Inisiatif Pemerintah
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Prioritas Utama, Dipersiapkan Pemerintah, Konsultasi denganh Badan Legislasi/DPR RI	Inisiatif Pemerintah
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota	Prioritas Utama, Dipersiapkan Pemerintah, Konsultasi dengan Badan Legislasi/DPR RI	Inisiatif Pemerintah
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	Prioritas Utama, Dipersiapkan Pemerintah, Konsultasi denganh Badan Legislasi/DPR RI. Termasuk perubahan mengenai pemerintahan desa.	Inisiatif Pemerintah
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Dipersiapkan oleh DPR/Badan Legislasi, Konsultasi dengan Departemen Hukum Dan HAM	Inisiatif DPR

NO.	JUDUL RUU	PERKEMBANGAN	KET
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan/Penggantian Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Dipersiapkan oleh DPR/Badan Legislasi, Konsultasi dengan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Inisiatif DPR
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi	Inisiatif DPR
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi	Inisiatif DPR
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan/Penggantian Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Tarapan Peradilan Agama	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintah	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perernakan dan Kesehatan Hewan	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Badan Legislasi, Koordinasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	Inisiatif DPR
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Obligasi Syariah (Sukuk)	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Lahan Abadi Pertanian	Draft Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik disiapkan oleh Pemerintah/DPR/Badan Legislasi	Inisiatif DPR
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah	Inisiatif Pemerintah